



KUMPULAN ABSTRAK JURNAL

**KOLEKSI E-DEPOSIT
PERPUSTAKAAN
NASIONAL**

TEMA POLITIK

2020



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Penyusun : Catur Fitri Widiyawati

Penyunting : Elah Laelasari

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MENANGGULANGI GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2009

Abdul Kadir

ABSTRAK

Fokus dari tulisan ini adalah peranan partai politik dalam menanggulangi golongan putih pada pemilihan Legislatif 2009. Pengurus partai politik yang ada menjalankan peranannya dengan berusaha sesuai UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Adapun usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan cara sosialisasi di desa-desa, sosialisasi politik, pendidikan politik, kampanye dan mengajak masyarakat untuk menghadiri acara kampanye. Partai politik sebagai organisasi yang terorganisir dan memiliki tujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan melakukan pendidikan politik dan juga sosialisasi politik sehingga masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Legislatif 2009. Untuk mengurangi intensitas golongan putih diperlukan keikutsertaan pengurus partai politik dan bekerjasama dengan masyarakat, karena pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan pemerintahan demokratis dan untuk mewujudkannya dibutuhkan peranan partai politik dan masyarakat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Dengan demikian dibutuhkan partai politik yang dapat menjalankan fungsinya

Kata kunci : Peran, Partai Politik, Golongan Putih, Legislatif

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 1, No 1 (2013)

Doi : [10.31289/jppuma.v1i1.552](https://doi.org/10.31289/jppuma.v1i1.552)

Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/552>

USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN

Lisken Rosda Silaban, Sugiharto ,M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian di Desa Silaban Kecamatan Lintong Ni Huta Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Populasi penelitian ini adalah seluruh petani yang ada di Desa Silaban Kecamatan Lintong Ni Huta Kabupaten Humbang Hasundutan yang berjumlah kurang lebih 1400 orang. Sampel penelitian ini adalah sebagian dari petani yang berjumlah kurang lebih 38 KK. Teknik pengumpulan data melalui observasi, angket, study documenter. Teknik analisa data adalah analisis deskriptif dengan menggunakan rumus tabel frekwensi yang kemudian dihitung persentasenya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh bahwa pembangunan pertanian saat ini berorientasi pada bidang teknologi pertanian seperti yang disarankan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pertanian yaitu melalui, penyuluhan yang diberikan Dinas Pertanian, pemakaian dan penggunaan alat, pemakaian bibit unggul, pemakaian pestisida atau pemberantasan hama dan alat pengolahan lahan. Jika pemanfaatan teknologi pertanian meningkat maka akan bermanfaat terhadap hasil produksi pertanian.

Kata kunci : Pemerintah; Pembangunan; Sektor; Pertanian

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 4, No 2 (2016)

Doi : [10.31289/jppuma.v4i2.458](https://doi.org/10.31289/jppuma.v4i2.458)

Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/458>

KONSEPTUALISASI HAK-HAK POLITIK DALAM SEJARAH PERIODESASI DEMOKRASI

R. Samidi & Suharno

ABSTRAK

Masyarakat golongan ekonomi bawah merupakan sasaran strategis bagi aktor politik untuk melancarkan aksi dan janji politik yang mengisyaratkan kepentingan. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan upaya meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat yang tidak hanya terbatas pada tindakan dan aktivitas politik, melainkan juga mencakup pengetahuan tentang politik yang dapat dimulai dengan memahami hakikat hak-hak politik dengan benar dan komprehensif. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan konseptualisasi hak-hak politik warga negara yang dirunut berdasarkan sejarah penggunaan konsep demokrasi dari berbagai periode waktu. Metode yang digunakan untuk menyusun artikel ini adalah studi kepustakaan dan data dianalisis dengan model analisis induktif. Hasil yang diperoleh dari penulisan artikel ini adalah konseptualisasi penggunaan hak politik berdasarkan sejarah penggunaan demokrasi yang dimulai dari masa Yunani Kuno (abad 6 sampai 3 SM) sampai dengan abad ke-20.

Kata kunci : Konseptualisasi, Hak-hak Politik, Periodisasi Demokrasi.

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 6, No 2 (2018)

Doi/ Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1895/1749>

ANALISIS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

Desna Aromatica, Heru Nurasa, Ida Widianingsih & Entang Adhy Muhtar

ABSTRAK

Perubahan Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan kembali pada tahun 2001. Tujuannya adalah terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Sumatera Barat yang merupakan masyarakat adat. Kabupaten pertama yang menyelenggarakan Pemerintahan Nagari adalah Kabupaten Solok. Sepanjang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, ternyata tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari khususnya di Kabupaten Solok masih belum terwujud. Terutama mengenai persoalan-persoalan tentang kelembagaan. Penelitian ini melakukan analisis terhadap kelembagaan pemerintahan Nagari. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan pemerintahan Nagari tidak dibangun dari nilai-nilai dan norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adat. Pemerintahan Nagari sama saja dengan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pemerintahan Desa. Perlu suatu desain kelembagaan Pemerintahan Nagari yang dibangun diatas fondasi nilai, norma tradisional sehingga Pemerintahan Nagari menjadi Pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat adat.

Kata kunci : Kelembagaan, Nagari, Pemerintahan, Kabupaten Solok

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 6, No 2 (2018)

Doi : [10.31289/jppuma.v6i2.1828](https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1828)

Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1828>

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN
2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PADA PENATAAN
KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DAERAH**

Susilawaty Munthe, Warjio Warjio, Kariono Kariono

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan kunci. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi sudah berjalan namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari empat aspek. Pertama adalah komunikasi dan koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah lainnya masih belum berjalan dengan baik. Kedua adalah Sumber Daya yang kurang mumpuni, baik dari jumlah maupun kompetensi. Ketiga, adalah Sikap Birokrasi yang memperlihatkan adanya program kegiatan sehingga perlu pembenahan dan penataan. Keempat adalah *Standard Operational Prosedure (SOP)* dalam melaksanakan implementasi telah mengacu sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Untuk *SOP* sesuai dengan struktur organisasi yang baru masih dalam proses penyusunan dan perumusan.

Kata kunci : Implementasi, Pemerintah Daerah, Penataan Kelembagaan.

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 6, No 1 (2018)

Doi : [10.31289/jppuma.v6i1.1518](https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1518)

Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1518>

KONSTRUKSI INDIKATOR DAN FORMULA PENILAIAN KUALITAS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Lati Praja Delmana, Aidinil Zetra, & Alfian Miko

ABSTRAK

Pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan sejak tahun 1955 berjalan tanpa memiliki alat ukur dan indikator kualitas Pemilu yang jelas. Peningkatan kualitas pemilu merupakan salah satu kunci mewujudkan demokrasi berkualitas. Sehingga perlu adanya kajian khusus yang memperbaiki standar kualitas Pemilu sesuai dengan keadaan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan indikator dan instrumen penilaian kualitas pemilu nasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan didukung oleh hasil penelitian yang relevan. Indikator penilaian kualitas pemilu dibangun melalui seluruh aspek proses tata kelola pemilu pra, masa dan pasca pemilu. Keseluruhan aspek tersebut memenuhi prinsip kesetaraan, kebebasan, keadilan, transparansi, profesionalitas, keamanan, integritas dan penyesuaian budaya politik lokal. Penilaian kualitas pemilu dapat dilakukan melalui metode jejak pendapat dan diukur dengan skala pengukuran ordinal. Standarisasi Indeks kualitas pemilu nasional yang dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, menjamin keakuratan pengukuran kualitas pemilu, sehingga kualitas pemilu dapat diperbaiki secara berkelanjutan dan konsisten.

Kata kunci : Kualitas Pemilu, Pemilihan Umum Indonesia, Penilaian Pemilu.

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 7, No 1 (2019)

Doi : [10.31289/jppuma.v6i1.1518](https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1518)

Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/2000/2046>

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN GOOD GOVERNANCE DI TINGKAT DESA

Irma Sunarty Purba, Djanius Djamin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat desa dalam meningkatkan Good Governance, dan hubungannya dalam meningkatkan Good Governance. Penelitian ini dilaksanakan di desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, menyebarkan kuisioner (angket) dan wawancara. Responden yang diambil 10% dari jumlah populasi 720 KK yakni 72 KK. Teknik sampling menggunakan sample random pada mata pencarian yang berbeda. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis persentase dan data diolah menggunakan koefisien korelasi dengan rumus product moment. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh, bahwa ada hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan meningkatkan Good Governance di tingkat Desa Aras Kabu Lubuk Pakam. Hal ini dibuktikan dengan t hitung adalah sebesar 9,966. Nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 9,966 > 1,966 (dengan interpolasi) pada taraf signifikan 5 % pada derajat kebebasan (dk) = n-2 (72-2) = 70 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Kata kunci : Partisipasi Masyarakat; Meningkatkan; Good Governance; Tingkat Desa, Kabupaten Deli Serdang

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 3, No 1 (2015)

Doi : [10.31289/jppuma.v3i1.908](https://doi.org/10.31289/jppuma.v3i1.908)

Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/908>

POLITIK GENDER DAN OTONOMI DAERAH: UPAYA PEMENUHAN HAK PEREMPUAN NELAYAN DI DESA SEI NAGALAWAN

Fernanda Putra Adela, Zakaria Zakaria, Nurlela Nurlela, Adil Arifin

ABSTRAK

Tulisan ini membahas persoalan yang dialami oleh istri-istri nelayan di Desa Sei Nagalawan yang mengalami bias sosial, dimana perempuan mengalami situasi paradoks yaitu ketika suami mereka pergi melaut untuk menangkap ikan. Secara otomatis tanggung jawab di keluarga dipegang oleh istri mereka dan setiap hari para istri rutin menangkap ikan dipinggir pantai. Namun, sampai saat ini para perempuan tersebut tidak dianggap sebagai nelayan yang mengakibatkan mereka tidak bisa mendapatkan asuransi kesehatan dan akses untuk meminjam uang ke Bank. Penulis menggabungkan perspektif Marxis, Fenomenologis dan Etnometodologis dalam melawan fenomena diskriminasi dalam kedudukannya sebagai perempuan nelayan ditengah beban kerjanya yang bisa mencapai 18 jam perhari. Pada akhir tulisan ini penulis memaparkan bagaimana strategi perempuan nelayan di Desa Sei Nagalawan melawan kemiskinan dengan ikut aktif menangkap ikan dipinggir pantai, mengembangkan ekowisata Kampung Nipah melalui Koperasi Serba Usaha Muara Maimbai, pengembangan UMKM dengan menjual makanan ringan berbahan baku mangrove (bakau) dan aktif melakukan aktivitas perjuangan demi memenuhi pengakuan perempuan sebagai nelayan.

Kata kunci : Perempuan Nelayan, Melawan Kemiskinan, Bias Sosial

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 7, No 1 (2019)

Doi : [10.31289/jppuma.v7i1.1989](https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.1989)

Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/1989>

**RELASI DEMOKRASI, KEKUASAAN, DAN POLITIK HUKUM DALAM
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**Muhammad Luthfi Munzir Abdul Muthalib Burhani, Jendrius Jendrius,
Syahrizal Syahrizal**

ABSTRAK

Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai produk politik hukum justru tidak menempatkan para kandidat yang akan bertarung dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dalam posisi yang adil dan setara. Petahana lebih diuntungkan sehingga menimbulkan ambiguitas kepentingan. Keadilan substansial sebagai bagian dari demokrasi yang sesungguhnya cenderung diabaikan demi kekuasaan. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi literatur. Bias kepentingan tersebut bisa dihindari dengan menempatkan regulasi dengan setara dan adil. Perlu ada revisi terhadap UU No.7 Tahun 2017 sehingga petahana yang akan mencalonkan diri kembali sebagai capres atau cawapres mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini untuk menjaga asas keadilan dalam proses pemilu 2019 dan menjaga agar ambiguitas kepentingan tidak digunakan untuk memperoleh kekuasaan.

Kata kunci : Relasi Demokrasi, Kekuasaan, Politik Hukum

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 7, No 1 (2019)

Doi : [10.31289/jppuma.v7i1.2021](https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2021)

Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/2021>

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TIONGHOA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH AGUNG

Suharyanto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat Tionghoa Dalam Pilkada Kota Binjai Tahun 2010 Di Kelurahan Kampung Tanjung Kecamatan Binjai Kota. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang beretnis Tionghoa sebanyak 326 KK. Teknik pengambilan sampel adalah dengan cara random sampling yaitu 10% dari 326 KK yaitu 32 KK yang diambil secara acak sederhana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan metode analisis deskriptif, kemudian dianalisis dengan tabel frekuensi. Berdasarkan hasil analisa dari observasi, penyebaran angket dan wawancara, dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Tionghoa di Kelurahan Kampung Tanjung Kecamatan Binjai Kota telah berpartisipasi dalam Pilkada Kota Binjai Tahun 2010. Dengan demikian jelaslah hasil penelitian ini mendukung hipotesis, yang sekaligus berarti hipotesis dapat diterima.

Kata kunci : Partisipasi Politik; Masyarakat Tionghoa; Pemilihan Kepala Daerah, Kota Binjai

Nama Jurnal : JPPUMA ; Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA

Volume : 2, No 2 (2014)

Doi : [10.31289/jppuma.v2i2.920](https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.920)

Link pdf : <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/920>